

Nama : Nasih Ahmad Fatikhuddin

Jurusan : RPL (Rekayasa Perangkat Lunak)

No.Absen : 26

Pembina Mata Pelajaran : Fajar Setiawan S.Pd

3.1 tujuan negara Indonesia dalam alinea ke-4 UDD 1945 baris 1-4 (tersedia satu slide ppt)

- Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia
- Memajukan kesejahteraan umum
- Mencerdaskan kehidupan bangsa
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial

3.2 memaknai tiap-tiap bagian yang tercantum dalam tujuan negara Indonesia

- Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia
Negara Indonesia memiliki tanggungjawab dan kewajiban yang absolut(mutlak) untuk melakukan upaya melindungi warga negaranya dimanapun dan dalam kondisi apapun dengan tanpa adanya pilih kasih (diskriminasi).
- Memajukan kesejahteraan umum
Kesejahteraan Umum bagi seluruh rakyat Indonesia secara hirarkis merupakan tanggungjawab negara atau pemerintah.
- Mencerdaskan kehidupan bangsa
Demikian juga, upaya Indonesia melakukan kerjasama budaya dan pendidikan dengan lingkungan Eksternal (Internasional) juga ditujukan untuk membangun SDM Indonesia yang memiliki kualitas dunia
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial
Dalam rangka Tugas Indonesia sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia (anggota PBB), Indonesia turut aktif ambil bagian dalam upaya perdamaian dunia.

3.3 cara yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia

- Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia
 - Dengan membentuk pertahanan negara yang kokoh.
 - Perlindungan terhadap kebudayaan masyarakatnya.
 - Masyarakat Indonesia harus memiliki jiwa yang kokoh dimana Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam hidup sehari-hari
 - mempertahankan/melestarikan kebudayaan bangsa.
- Memajukan kesejahteraan umum
 - Memberikan subsidi yang tepat sasaran
 - Memberikan pelayanan yang menyeluruh hingga ke pelosok-pelosok nusantara
- Mencerdaskan kehidupan bangsa

- Pengadaan beasiswa bagi para pelajar yang berprestasi ataupun yang kurang mampu untuk membayar biaya pendidikan
- Penyesuaian kurikulum
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial
 - Membantu negara yang masih terjajah dengan bantuan nonfisik PBB dan fisik dengan mengirim angkatan militer untuk menyelesaikan konflik negara lain

3.4 pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tujuan

Peran pusat dalam kerangka otonomi daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan sehingga daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Sedangkan peran daerah akan lebih banyak bersifat pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam melaksanakan otonominya, daerah berwenang membuat kebijakan daerah. Kebijakan yang diambil daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi..

3.5 perlunya masyarakat dilibatkan dalam mendukung tercapainya tujuan negara

Indonesia

Dalam masyarakat Pancasila yang berdasarkan UUD 1945 ditentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan. Artinya bahwa, hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dengan mengikutsertakan rakyat berlaku pada siapapun tanpa kecuali.

3.6 kasus penyalahgunaan kekuasaan negara di pusat dan daerah dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945 alinea ke-4 (silahkan cari kasusnya secara mandiri)

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan bahwa pihaknya terus menelusuri kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun dalam proyek kasus e-KTP atas tersangka Ketua DPR RI [Setya Novanto](#).

"Kami telusuri secara terus menerus ke mana saja aliran dana dari kerugian keuangan negara sekitar Rp 2,3 triliun. Termasuk juga aset menjadi salah satu perhatian dari penyidik KPK," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Febri mengungkapkan, sejumlah nama telah diperiksa KPK sebagai saksi Novanto yang juga Ketua Umum Golkar tersebut. Dari pihak swasta antara lain, Fransiscus Eduwardus Cintong Tigor Tonggo Tua Simbolon, Tunggul Baskoro dan Shierlyn Chandra serta seorang karyawan Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Agus Eko Priadi.

"Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pihak swasta, di mana beberapa adalah nama baru," kat Febri.

Tak hanya itu, KPK juga menelusuri larinya uang Novanto dalam kasus tersebut dengan menggunakan metode follow the money.

"Lebih jauh kami gunakan pendekatan follow the money yaitu kami melihat transaksi keuangan yang diduga terkait dengan kasus e-KTP," kata dia.

Baru-baru ini, menurut Febri, KPK juga telah melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti baru dalam kasus yang sama.

"Kemarin beberapa penggeledahan dan disita sejumlah barang bukti elektronik komunikasi-komunikasi yang ada. Kami dapatkan info yang baru. Jadi kami mulai dapatkan info yang lebih kuat," kata dia.

Diketahui, Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP sewaktu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. Dia diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi.

Selain itu, Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan. Ia diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.